

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amiek Soemarmi & Sekar Anggun Gading Pinilih, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, (Semarang: Undip Press, 2016)
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992)
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)
- Buku Panduan Penulisan Hukum* (Skripsi), (Semarang: Fakultas Hukum Universitas diponegoro, 2023)
- C.S.T. Kansil dan Chistine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Firmansyah Arifin, *et.al.*, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Penyusunan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2020)
- Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006)
- Moh. Kusnardi & Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2018)
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusamedia, 2011)
- Philipus M. Hadjo, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2011).

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018)

Sudarta, *Konflik Islam-Kristen, Mengungkap Akar Masalah, Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999)

Suherman Toha, *et. Al, Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Intern Agama*, (Jakarta: BPHN KEMENKUMHAM RI, 2011)

JURNAL:

Ahmad Mukri Aji, "Identifikasi Potensi Konflik Pra dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia dan Upaya Untuk Mengatasinya (Studi Kasus di Kota dan Kabupaten Bogor)", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2 No. 1 (Juni 1, 2014): 6 <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.130>

Ardilafiza, *et all*, Kedudukan dan Karakteristik peraturan Menteri dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3 (September, 2022) : <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.889>

Dhanang Alim Maksu, *Tugas dan Fungsi Wakil Presiden, Lex Crime*, Vol. IV, No. 1, (Maret 2015): 123, <https://media.neliti.com/media/publications/3227-ID-tugas-dan-fungsi-wakil-presiden-di-indonesia.pdf>

Evi, Purnamawati & Hujawati, "Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia", *Jurnal Solusi* Volume 20 Nomor 1, (Januari, 2022): 101, <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.529>

Josep Leonardy, "Eksistensi Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) Dalam Konteks Indonesia Sebagai Hukum Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Volume 5, Nomor 2 (April 28, 2023) : <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14370>

Mar'atun Fitriah & Nur Wahyuni Utami, "Menyoal Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Sebagai Upaya Penataan Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No. 2* (Juni, 2022): <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/10/pdf#:~:text=Pasal%201%20Angka%201%20Permen,Negeri%20bersama%20Menteri%20lainnya%E2%80%9D%2032>

Mohammad Yuhdi, "Peranan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *LIKHITAPRAJNA, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*,

Volume 15, Nomor 1 (16 April, 2013), 172:
<https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v15i1.81>

Muhammad Dzikirullah H. Noho, “Kedudukan *Common Law System* dan *Civil Law System* Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, ISSN 2089-9009 (September 1, 2020), 1: [Microsoft Word - MENDUDUKAN COMMON LAW SYSTEM DAN CIVIL LAW SYSTEM MELALUI SUDUT PANDANG HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA - koreksi 31 Ag.docx \(bphn.go.id\)](https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v15i1.81)

Mukhlis, “Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Dalam Memutuskan Dan Menafsirkan UUD Setelah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal FH UNISBA*, Vol. XIII, No. 1, (Maret 2011): 8,
<https://doi.org/10.29313/sh.v13i1.649>

Ni Luh Gede Astariyani & Bagus Hermanto, “Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16, Nomor 4 (Desember, 2019) 436:
<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/533-1894-1-PB.pdf>

Roziqin & Ibnu Sofyhan, “Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam sistem ketatanegaraan indonesia: *the position state ministry institutions in the indonesian state system*”, *Jurnal de Jure*, Volume 15, Nomor 1 (April, 2023) : 35, [0.36277/jurnaldejure.v15i1.794](https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v15i1.794)

Victor Imanuel W. Nalle, “Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam undang-Undang Pemerintah”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1 (April, 2016), 7: <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p1-16>

Zaelani, “Pelimpahan Kewenangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Delegation of Authority the Establishment of Legislation Regulation*),” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 9, No. 1 (April, 2012), hlm 126 – 127: <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/380/261>

SKRIPSI:

Anita Uca, “Penerapan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat”, (Padang, Skripsi Universitas Andalas, 2021), 5,
<http://scholar.unand.ac.id/93067/2/Bab%20I.pdf>

Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,” Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993

Salshabila, R., & M. Andi Lolo, Analisis Yuridis Kedudukan Surat Keputusan Bersama Lembaga Negara dalam Peraturan Perundang Undangan

- Indonesia. (Makassar, Skripsi Universitas Hasanuddin, 2021), 5, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/8442/>
- Sariman Damanik, Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002), (Riau, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2020), <https://repository.uin-suska.ac.id/28402/2/SARIMAN%20DAMANIK.pdf>
- Shidarta, “Kebingungan Antara Peraturan, Keputusan, dan Surat Keputusan”, (Jakarta, Binus University, 2017), [KEBINGUNGAN ANTARA PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN SURAT KEPUTUSAN \(binus.ac.id\)](https://repository.binus.ac.id/kebingungan-antara-peraturan-keputusan-dan-surat-keputusan)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Menteri Koordinator serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

INTERNET:

Annisa Medina Sari, “Apa arti Pancasila Bagi Bangsa Indonesia?” *in Opini Fakultas Hukum UMSU*, [https://fahum.umsu.ac.id/apa-arti-pancasila-bagi-bangsa-indonesia/#:~:text=Arti%20Pancasila%20Bagi%20Bangsa%20Indonesia%](https://fahum.umsu.ac.id/apa-arti-pancasila-bagi-bangsa-indonesia/#:~:text=Arti%20Pancasila%20Bagi%20Bangsa%20Indonesia%20)

20yaitu%20sebagai%20landasan%20kokoh%20yang,suku%2C%20dan%20agama%20yang%20kaya, Diakses Pada 20 Desember 2023

Shidarta, “Kebingungan Antara Peraturan, Keputusan, dan Surat Keputusan, KEBINGUNGAN ANTARA PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN SURAT KEPUTUSAN (binus.ac.id). Diakses pada 25 Januari 2024

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tugas dan Fungsi*, <https://kemenag.go.id/artikel/tugas-dan-fungsi>, Diakses pada 28 April 2024

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Tugas dan Fungsi*, <https://www.kemendagri.go.id/profile/tugasfungsi>, Diakses pada 28 April 2024

Vina Oktavia, *Persoalan Izin, Warga Bubarkan Ibadah Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud*, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/20/persoalan-izin-warga-bubarkan-ibadah-jemaat-gereja-kristen-kemah-daud>, Diakses pada 20 Mei 2024

Agus Yulianto, *Kronologi Ricuhnya Gereja Kemah Daud di Lampung*, <https://news.republika.co.id/berita/rqfiz5396/kronologi-ricuhnya-gereja-jemaat-kemah-daud-di-lampung>, Diakses pada 20 Mei 2024

Abraham, *Penolakan Pura di Bekasi: 'Walau Cuma Dua-Tiga Umat, Mereka tetap Berhak Punya Rumah Ibadah'*, [Penolakan pura di Bekasi: 'Walau cuma dua-tiga umat, mereka tetap berhak punya rumah ibadah' - BBC News Indonesia](https://www.bbc.com/news/indonesia-67444444), Diakses pada 20 Mei 2024

